UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Perseorangan Bersertipikat Menjadi Tanah Kalurahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo)
Azzahra Audria Raharja, Dr.Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andjarwati, Any. 2026. "Dari Sistem Pertanahan Kolonial Hingga Nasional" Dalam *Kebijakan Agraria di Yogyakarta Eksistensi Tanah Kasultanan*", 143-183. Surakarta: UNS Press.

Fadhallah, A. 2021. *Wawancara*. Jakarta: UNJ Press.

Harsono, Boedi. 2019. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentuk Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.

Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.

Muhaimin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Santoso, Urip. 2010. *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

Suyanto. 2020. *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Surabaya: CV Jakad Publishing.

Sutedi, Adrian. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, Adrian. 2011. *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Solikin, Nur. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/73531.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Perseorangan Bersertipikat Menjadi Tanah Kalurahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo)
Azzahra Audria Raharja, Dr.Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6630).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1202).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 246).

Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Nomor 2013 Nomor 9).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 34).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 24).

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 51).

Surat Edaran Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor B/HR.02/797-400.20/IV/2025 tanggal 11 April 2025 tentang Permohonan Solusi Kendala Pendaftaran Tanah Kalurahan Bersertipikat (Pencatatan Perubahan).

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Prabowo, Hendro. “Pluralisme dalam Pengaturan, Penguasaan dan Kepemilikan Tanah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Gadjah Mada, 2004.

Pertiwi, Putri. “Analisis Penyelesaian Sengketa Lahan Stasiun Yogyakarta antara PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Kasultanan Yogyakarta.” Universitas

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Perseorangan Bersertipikat Menjadi Tanah Kalurahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo)
Azzahra Audria Raharja, Dr.Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Gadjah Mada, 2026.

Salma, Syafira Jihan. "Implikasi Penerbitan Sertipikat Hak Milik di Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata X." Universitas Gadjah Mada, 2025.

ARTIKEL JURNAL

Bayu, Dimas, Candra Prasetya, Dian Aries Mujiburohman, dan Yohanes Supama. "Dinamika Legalisasi Tanah Desa di Kabupaten Sleman, Yogyakarta: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Implikasinya." *Jurnal Widya Bhumi* 4, no. 2 (2024): 136–158.

Endriana, Eka Putri. "Perbandingan Pengaturan Dalam UU No. 2 Tahun 2012 Dan Perdais No. 1 Tahun 2017 Terkait Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Tanah Kesultanan." *PERSPEKTIF : Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 29, no. 2 (2024): 89–99. https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/896.

Fadillah, Arman Reza. "Pentingnya Pencatatan Tanah Terkait Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Peralihan Hak Milik Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 592/PDT.G/2019/PN DPS)" 4 (2022): 776.

Haryanti, Tri Wahyoe, Susy Yanti Simanjuntak, dan Nunuk Widayati. "Peran PPAT terhadap Pelaksanaan Asas Nemo Plus Yuris pada Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli" 11, no. 3 (2023): 4. https://doi.org/10.37081/ed.v11i3.4799.

Huda, Ni'matul. "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2000): 90–106. https://doi.org/10.20885/iustum.vol7.iss13.art7.

Ida Ayu Nanda Parameswari, dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. "Kekuatan Hukum Akta Otentik sebagai Bukti Sah Pelepasan Hak atas Tanah Ayahan Desa di Bali." *Acta Comitas* 10, no. 03 (2025): 600–611. https://doi.org/10.24843/ac.2025.v10.i03.p11

Irianto, Sulistyowati. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017): 155. https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339.

Santoso, Urip. "Hibah Tanah Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Warga Negara Indonesia" XX, no. 3 (2015): 136–145.

———. "Kajian Teoritis Jual Beli Hak Milik Atas Tanah." *Perspektif* 4, no. 3 (1999).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Perseorangan Bersertipikat Menjadi Tanah Kalurahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo)
Azzahra Audria Raharja, Dr.Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Silviana, Ana. "Urgensi Sertipikat Tanah Elektronik Dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia" 4, no. 1 (2021): 52.

Sinaga, Elsa Pebriani, dan Tri Daya Rini. "Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Penemgbangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Governabilitas* 3, no. November (2022): 132–148.

Siregar, Mutia Sari, Tan Kamello, dan Hasim Purba. "Pendaftaran Tanah Karena Pewarisan yang tidak Memasukkan Keseluruhan Ahli Waris pada Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Putusan Negeri Sorong No. 77/Pdt.G/2017/PN.Son)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 3 (2025): 2084–95. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3614.

Subhaktiyasa et al. "Menentukan Populasi dan Sampel : Pendekatan Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9 (2024): 2721–2731.

Sukmawati, Roro Anggi, Julianto Jover Jotam Kalalo, Herry Hendri Fernando Mote, dan Salvadoris Pieter. "Kepastian Hukum Proses Peralihan Hak Atas Tanah Berkaitan Dengan Identitas Para Pihak Dalam Proses Balik Nama Sertipikat Hak Milik" 3, no. 1 (2026): 18.

Wicaksono, Dian Agung, dan Almonika Cindy Fatika Sari. "Mendudukkan Kasultanan dan Kadipaten sebagai Subyek Hak Milik Atas Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam Keistimewaan Yogyakarta" 8 (2019): 311–328.

Wicaksono, Dian Agung, Ananda Prima Yurista, dan Almonika Sari Cindy Fatika Sari. "Kompabilitas Pengaturan Pendaftaran Tanah terhadap Kompleksitas Keadaan Hukum Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten." *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6, no. 2 (2020): 172–187.

Wongso, Steven. "Keabsahan Tukar Menukar Dengan Objek Hak Atas Tanah Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk)." *Indonesian Notary* 2, no. 1 (2020): 9. https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss1/1.

BULETIN

Rufaiza, Ester. "Tanah Pusaka, Pembangunan Bertumbuh: Peran Keistimewaan Pertanahan Dalam Infrastruktur DIY." *PERTARU Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY* 1, no. 1 (2025): 30.

INTERNET

Nisrina, Syifani Ghina. "Panduan Mengurus Alih Waris pada Sertipikat Tanah agar

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Proses Pendaftaran Tanah Hak Milik Perseorangan Bersertipikat Menjadi Tanah Kalurahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Kabupaten Kulon Progo)
Azzahra Audria Raharja, Dr.Jur Any Andjarwati, S.H., M.Jur
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hak Atas Tanah Tetap Terlindungi." Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia, 2026. https://www.atrbpn.go.id/berita/panduan-mengurus-alih-waris-pada-sertipikat-tanah-agar-hak-atas-tanah-tetap-terlindungi.

Oktafian, Abrianto Bagus, dan Muhammad Fikri Azharuddin. "Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan." unairnews, 2022. https://unair.ac.id/status-hak-atas-tanah-kas-desa-dan-prosedur-pendaftarannya-menurut-hukum-administrasi-pertanahan/.

Romadhon, Meyshall. "Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Masih Atas Nama Orang Meninggal." Kantor Pertanahan Kota Serang, 2026. https://kot-serang.atrbpn.go.id/informasi pertanahan/proses-balik-nama-sertipikat-tanah-masih-atas-nama-orang-meninggal.